



# RENCANA KERJA

**DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL**

# KABUPATEN LANGKAT

**TAHUN 2024**

**Rencana Kerja (Renja)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Langkat**

---

**Tahun 2024**

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat menyusun Rencana Kerja (Renja) Dukcapil Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dukcapil. Renja Dukcapil Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Langkat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2024.

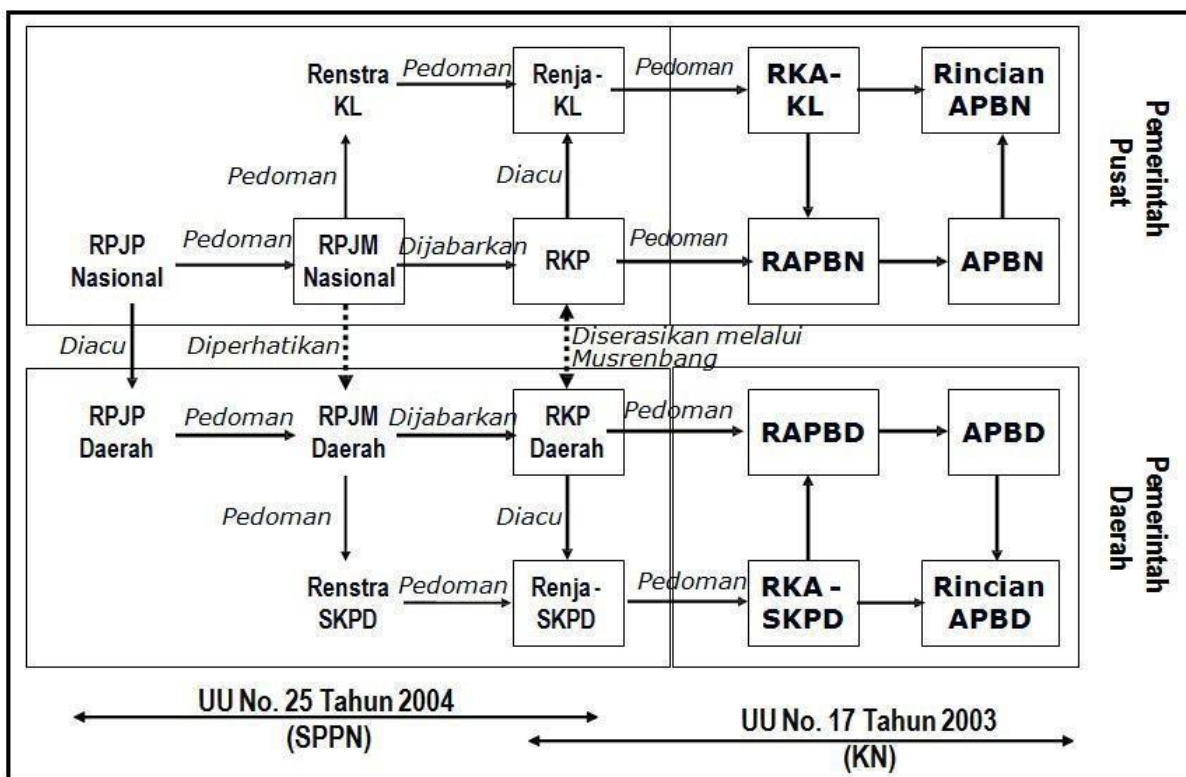
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dukcapil Kabupaten Langkat Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan
- b. Penyusunan Rencana Awal
- c. Penyusunan Rancangan
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
- e. Perumusan Rencana Akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dukcapil Kabupaten Langkat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024;

- j. Peraturan Bupati Langkat nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024;
- k. Peraturan Bupati Langkat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2024;

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dukcapil dalam penyusunan RKA Dukcapil Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Dukcapil Tahun 2024 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dukcapil Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Dukcapil Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **I.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

## **BAB II.**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dukcapil Kabupaten Langkat Tahun 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dukcapil Kabupaten Langkat Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dukcapil Kabupaten Langkat Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dukcapil Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Langkat Tahun 2022.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah Dukcapil Kabupaten Langkat yang disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.1.

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)
<b>2</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>				
<b>2.01</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
	<b>Program</b>				
<b>2.12.01</b>	<b>I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>BB (60-70)</b>	<b>BB (60-70)</b>	<b>75%</b>
	<b>Kegiatan</b>				
2.12.01.2.01	A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	100%	100%
	<b>Sub Kegiatan</b>				
2.12.01.2.01.01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.12.01.2.01.02	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
2.12.01.2.01.06	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	<b>Kegiatan</b>				

2.12.01.2.02	B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	<b>Sub Kegiatan</b>				
2.12.01.2.02.01	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	29 Orang	100%
2.12.01.2.02.02	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29 Orang	29 Orang	100%
2.12.01.2.02.05	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.12.01.2.02.07	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Dokumen	18 Dokumen	100%
	<b>Kegiatan</b>				
2.12.01.2.05	C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	<b>Sub Kegiatan</b>				
2.12.01.2.05.09	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	175 Orang	175 Orang	100%
	<b>Kegiatan</b>				
2.12.01.2.06	D. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	<b>Sub Kegiatan</b>				
2.12.01.2.06.01	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Jenis	12 Jenis	100%

2.12.01.2.06.02	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	37 Jenis	37 Jenis	100%
2.12.01.2.06.03	3. Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	31 Jenis	31 Jenis	100%
2.12.01.2.06.04	4. Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang Disediakan	12 Rapat	12 Rapat	100%
2.12.01.2.06.05	5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	8 Jenis	8 jenis	100%
2.12.01.2.06.06	6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang- undangan yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	100%
2.12.01.2.06.09	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	100%
	<b>Kegiatan</b>				
2.12.01.2.07	E. Pengadaan Barang Milik Daerah Peunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100%	100%
	<b>Sub Kegiatan</b>				
2.12.01.2.07.05	1. Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Jenis	4 Jenis	100%
	<b>Kegiatan</b>				
2.12.01.2.08	F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
	<b>Sub Kegiatan</b>				

2.12.01.2.08.02	1. Penyediaan Jasa Komuniasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komuniasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun	100%
2.12.01.2.08.04	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyedia Jasa pelayanan umum kantor	144 Orang	144 Orang	100%
	Kegiatan				
2.12.01.2.09	G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah, Terpeliharanya Gedung Kantor dan Barang Milik Negara	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan				
2.12.01.2.09.02	1, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Kendaraan	16 Kendaraan	100%
2.12.01.2.09.06	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	64 Unit	100%
2.12.01.2.09.09	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung	2 Gedung	100%
	<b>Program</b>				
2.12.02	II. Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang melakukan Perekaman Data Kependudukan	100%	99,28%	100%
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran penduduk	100%	95,97%	100%
	<b>Kegiatan</b>				
2.12.02.2.01	A. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%
	<b>Sub Kegiatan</b>				
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%
	<b>Program</b>				
2.12.03	III. Program Pencatatn Sipil	Rata- Rata Waktu Pelayanan Administrasi Kependudukan	3 Hari	3 hari	100%

		Persentase anak usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran	100%	93,9 %	100%
		Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pencatatan Sipil	1	1	100%
	<b>Kegiatan</b>				
2.12.03.2.01	A. Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	100%	100%	100%
	<b>Sub Kegiatan</b>				
2.12.03.2.01.02	1. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen hasil peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	100%	93,9%	100%
2.12.03.2.01.05	2. Pengadaan dokumen kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko, KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	100 %	100%	100%
	<b>Program</b>				
2.12.04	IV. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Database kependudukan skala kabupaten	100%	100%	100%
	<b>Kegiatan</b>				
2.12.04.2.03	A. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	100%	100%
	<b>Sub Kegiatan</b>				
2.12.04.2.03.01	1. Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	13 OPD	13 OPD	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dukcapil Tahun 2022 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.  
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
II.	Program Pendaftaran Penduduk	
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	a. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penduduk	Belum optimalnya komunikasi dalam edukasi kepada masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen administrasi kependudukan
III.	Program Pencatatan Sipil	
	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	
	a. Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Masih rendahnya Cakupan Akta Pencatatan Sipil karena masih kurangnya Edukasi ke Masyarakat tentang Pentingnya Dokumen Pencatatan Sipil
IV.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Masih rendahnya kepedulian Masyarakat untuk melaporkan Data kependudukan
--	--	--

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.  
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
II.	Program Pendaftaran Penduduk	
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	a. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penduduk	Dukungan Pemerintah Pusat maupun Daerah yang besar terhadap isu Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan
III.	Program Pencatatan Sipil	
	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	
	a. Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Pengaruh teknologi dan informasi sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan pengurusan dokumen Pencatatan Sipil
IV.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

	a. Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Adanya Sosialisasi tentang data kependudukan ke masyarakat
--	---	--

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2022 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Dukcapil yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4.

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Dukcapil Kabupaten Langkat

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2019*)	Tahun 2020*)	Tahun 2021*)	Tahun 2022		Catatan Analisis
					Target	Realisasi	
1	Persentase Penduduk yang melakukan Perekaman Data Kependudukan	96,18	97	97,21	98	99,28	
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	77,5	77,18	87,61	78	95,97	
3	Rata-Rata Waktu Pelayanan Administrasi Kependudukan	4	4	3	3	3	
4	Persentase anak 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran	81,13	81,63	90	84	93,9	
5	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	77,5	77,18	87,61	78	95,97	

Keterangan: \*) Tahun 2019-2021 merupakan angka Realisasi.



Sesuai pencapaian IKU Dukcapil Kabupaten Langkat Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dukcapil Kabupaten Langkat yang dapat memenuhi target adalah:

- a. Persentase Penduduk yang melakukan Perekaman Data Kependudukan;
- b. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- c. Rata-rata Waktu Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. Persentase anak usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran;
- e. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil;

2. IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adanya kebijakan/Inovasi pelayanan keliling jemput bola ke sekolah-sekolah dan ke desa-desa dalam mewujudkan perekaman data kependudukan;
- b. Peran serta masyarakat dalam penilaian terhadap pelayanan yang diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta terus mengevaluasi terkait pelayanan;
- d. Terus berupaya atau membuat inovasi terkait pelayanan kepada masyarakat;

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dukcapil Kabupaten Langkat merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan. Pada Tahun 2022 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dukcapil Kabupaten

Langkat. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5.  
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor: 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat</li> <li>• Tersedianya Sumber Daya Manusia</li> <li>• Tersedianya sarana dan Prasarana</li> <li>• Tersedianya Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik</li> <li>• Tersedianya Mobil Layanan keliling untuk Pelayanan Jemput Bola</li> <li>• Tersedianya Anggaran Program SIAK yang mampu memberikan identitas tunggal secara nasional berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan) Sudah memiliki database kependudukan dalam SIAK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya Komunikasi dalam Edukasi Kepada Masyarakat akan pentingnya Memiliki Dokumen Administrasi kependudukan.</li> <li>• Terbatasnya SDM yang memiliki Kompetensi sesuai dengan Standar Kebutuhan</li> <li>• Terbatasnya Ketersediaan Anggaran</li> <li>• Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik</li> <li>• Belum terlaksananya Standar Operasional prosedur ( SOP ) dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi</li> <li>• Masih rendahnya Cakupan Akta Pencatatan Sipil karena kurangnya Edukasi ke Masyarakat tentang Pentingnya Dokumen Pencatatan Sipil</li> </ul>

Selain itu, selama Tahun 2022, D u k c a p i l Kabupaten Langkat juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6.  
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama  
Tahun 2022

Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan</li> <li>● Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan mudah diakses untuk mendorong transformasi digital</li> <li>● Pengaruh teknologi dan informasi sehingga mempermudah masyarakat untuk mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan pengurusan dokumen Pencatatan Sipil</li> <li>● Dukungan Pemerintah Pusat maupun Daerah yang besar terhadap isu Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan</li> <li>● Terbukanya akses dengan lembaga Pendidikan untuk mengembangkan potensi SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Belum optimalnya Komunikasi dalam Edukasi Kepada Masyarakat akan pentingnya Memiliki Dokumen Administrasi kependudukan.</li> <li>● Terbatasnya SDM yang memiliki Kompetensi sesuai dengan Standar Kebutuhan</li> <li>● Terbatasnya Ketersediaan Anggaran</li> <li>● Masih Kurangnya Sarana dan Prasana Pendukung Pelayanan Publik</li> <li>● Belum terlaksananya Standar Operasional prosedur ( SOP ) dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi</li> <li>● Tuntutan stakeholders akan produk layanan Administrasi kependudukan yang berkualitas, transparandan partisipatif</li> </ul>

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dukcapil Kabupaten Langkat pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Standar pelayanan yang belum sesuai dengan Permen PAN dan RB RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

2. Masih rendah capaian target persentase jumlah kepemilikan ber KTP elektronik terhadap wajib KTP pada Tahun 2018 sebesar 91 persen masih jauh dibandingkan dengan target nasional yaitu sebesar 100 persen. Penyebab rendahnya pencapaian tersebut antara lain masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan belum mengurus pembuatan KTP baik penduduk yang baru menginjak diatas > 17 tahun;
3. Kuantitas dan kualitas SDM pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil berdasarkan spesifikasi profesi masih kurang. Dari aspek kualitas, jenis dan kuantitas tenaga di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil masih sangat kurang bila dibandingkan dengan standar tenaga yang seharusnya bila dihitung berdasarkan jumlah penduduk, beban kerja dan jumlah fasilitas berupa peralatan teknologi informasi dan sarana pendukung lainnya yang ada. Dengan kebutuhan masyarakat yang ingin secara cepat diberikan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan, bila hal ini kurang diantisipasi oleh tenaga pelayanan administrasi kependudukan maka akan mempunyai image kurang baik khususnya untuk peningkatan kualitas pembuatan dokumen kependudukan. Dengan faktor pendidikan formal dan non formal dirasakan kurang, sehingga diperlukan untuk ditingkatkan sesuai dengan jenjang dan profesi yang dimiliki;
4. Rendahnya cakupan penerbitan akta catatan sipil, akta nikah dan akta kematian perlu dilakukan sosialisasi dan pelayanan keliling jemput bola (stelsel aktif) ke kecamatan dan desa di Kabupaten Langkat agar masyarakat menyadari akan pentingnya dokumen kependudukan untuk kepentingan tertentu seperti mencari pekerjaan,

melanjutkan sekolah, pemutakhiran data pemilu dan pembuatan paspor;

5. Kebutuhan akan Blanko KTP elektronik belum sesuai dengan pendistribusian yang diberikan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang berdampak pada pelayanan pembuatan KTP elektronik di daerah;
6. Perlunya penyusunan SOP pelayanan pada Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat berdasarkan peraturan terbaru.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dukcapil Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	RKPD										
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kab. Langkat</b>		<b>100%</b>	<b>9.901.534.446</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kab. Langkat</b>		<b>100%</b>	<b>9.901.534.446</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	<b>Kab. Langkat</b>		<b>100%</b>	<b>10.045.915</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	<b>Kab. Langkat</b>		<b>100%</b>	<b>10.045.915</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Langkat	Terlaksanya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.421.782	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Langkat	Terlaksanya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.421.782	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Langkat	Terlaksanya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	3.211.155	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Langkat	Terlaksanya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	3.211.155	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Langkat	Terlaksananya Laporan Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4.412.978	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Langkat	Terlaksananya Laporan Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4.412.978	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Langkat</b>		<b>100%</b>	<b>4.113.203.155</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Langkat</b>		<b>100%</b>	<b>4.113.203.155</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Langkat	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ Bulan	3.924.199.660	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Langkat	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ Bulan	3.924.199.660	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Langkat	Terpenuhinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Orang/ Bulan	182.280.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Langkat	Terpenuhinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Orang/ Bulan	182.280.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Langkat	Terpenuhinya Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	4.254.445	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Langkat	Terpenuhinya Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	4.254.445	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Kab. Langkat	Terpenuhinya Laporan Keuangan Triwulan dan Semesteran SKPD	15 Laporan	2.469.050	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Kab. Langkat	Terpenuhinya Laporan Keuangan Triwulan dan Semesteran SKPD	15 Laporan	2.469.050	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Langkat</b>		<b>100%</b>	<b>80.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Langkat</b>		<b>100%</b>	<b>80.000.000</b>	
	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Kab. Langkat	Terlaksananya Bimtek dan Diklat Pegawai	35 Orang	80.000.000	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Kab. Langkat	Terlaksananya Bimtek dan Diklat Pegawai	35 Orang	80.000.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Langkat</b>		<b>100%</b>	<b>1.486.878.679</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Langkat</b>		<b>100%</b>	<b>1.486.878.679</b>	
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Langkat	Terpenuhinya kebutuhan komponen alat listrik dan elektronik	12 Paket	30.495.705	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Langkat	Terpenuhinya kebutuhan komponen alat listrik dan elektronik	12 Paket	30.495.705	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kab. Langkat	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36 Paket	885.961.469	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kab. Langkat	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36 Paket	885.961.469	
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Kab. Langkat	Terpenuhinya Peralatan Rumah tangga Kantor	26 Paket	65.536.505	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Kab. Langkat	Terpenuhinya Peralatan Rumah tangga Kantor	26 Paket	65.536.505	
	Penyediaan bahan Logistik kantor	Kab. Langkat	Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	25 Paket	20.385.000	Penyediaan bahan Logistik kantor	Kab. Langkat	Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	25 Paket	20.385.000	
	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Kab. Langkat	Terpenuhinya kebutuhan barang hasil cetakan dan penggandaan	8 Paket	27.500.000	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Kab. Langkat	Terpenuhinya kebutuhan barang hasil cetakan dan penggandaan	8 Paket	27.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Langkat	Terpenuhinya kebutuhan akan bahan bacaan peraturan perundang2an	7 Dokumen	7.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Langkat	Terpenuhinya kebutuhan akan bahan bacaan peraturan perundang2an	7 Dokumen	7.000.000	

	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Langkat	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	450.000.000	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Langkat	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	450.000.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Langkat</b>		<b>100%</b>	<b>1.419.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Langkat</b>		<b>100%</b>	<b>1.419.000.000</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas lapangan	Kab. Langkat	Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	1 Unit	30.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas lapangan	Kab. Langkat	Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	1 Unit	30.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Langkat	Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	1 Unit	539.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Langkat	Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	1 Unit	539.000.000	
	Pengadaan Meubeler	Kab. Langkat	Terpenuhinya kebutuhan meubeleur	5 Unit	50.000.000	Pengadaan Meubeler	Kab. Langkat	Terpenuhinya kebutuhan meubeleur	5 Unit	50.000.000	
	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Kab. Langkat	Terpenuhinya Peralatan dan Mesin kantor	15 Unit	800.000.000	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Kab. Langkat	Terpenuhinya Peralatan dan Mesin kantor	15 Unit	800.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Langkat</b>		<b>100%</b>	<b>2.328.091.673</b>	<b>Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Langkat</b>		<b>100%</b>	<b>2.328.091.673</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Langkat	Terbayarnya rekening air, listrik dan telepon	3 Laporan	170.091.673	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Langkat	Terbayarnya rekening air, listrik dan telepon	3 Laporan	170.091.673	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Langkat	Terlaksananya tugas-tugas administrasi honorarium pns dan non pns	148 Laporan	2.158.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Langkat	Terlaksananya tugas-tugas administrasi honorarium pns dan non pns	148 Laporan	2.158.000.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah</b>	<b>Kab. langkat</b>		<b>100%</b>	<b>464.315.024</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>Kab. langkat</b>		<b>100%</b>	<b>464.315.024</b>	



	Daerah					pemerintah Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Langkat	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan pajak kendaraan	24 Orang	229.645.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Langkat	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan pajak kendaraan	24 Orang	229.645.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Langkat	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor	105 Unit	80.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Langkat	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor	105 Unit	80.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Langkat	Terpeliharanya gedung perkantoran	2 Unit	154.670.024	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Langkat	Terpeliharanya gedung perkantoran	2 Unit	154.670.024	
	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Kab. langkat</b>		<b>100%</b>	<b>189.201.000</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Kab. langkat</b>		<b>100%</b>	<b>189.201.000</b>	
	<b>Pelayanan Pendaftaran penduduk</b>	<b>Kab. langkat</b>		<b>100%</b>	<b>189.201.000</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran penduduk</b>	<b>Kab. langkat</b>		<b>100%</b>	<b>189.201.000</b>	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Langkat	Terlaksananya Dokumen Pelayanan Pendaftaran penduduk	100%	189.201.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Langkat	Terlaksananya Dokumen Pelayanan Pendaftaran penduduk	100%	189.201.000	
	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Kab. langkat</b>		<b>100%</b>	<b>143.100.000</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Kab. langkat</b>		<b>100%</b>	<b>143.100.000</b>	
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Kab. Langkat</b>		<b>100%</b>	<b>113.100.000</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Kab. Langkat</b>		<b>100%</b>	<b>113.100.000</b>	
	Peningkatan Pelayanan dalam Pencatatan Sipil	Kab. Langkat	Terlaksananya Pelayanan dalam Pencatatan Sipil	100%	113.100.000	Peningkatan Pelayanan dalam Pencatatan Sipil	Kab. Langkat	Terlaksananya Pelayanan dalam Pencatatan Sipil	100%	113.100.000	
	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Kab. Langkat</b>		<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Kab. Langkat</b>		<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	
	Koordinasi dengan Kementerian yang Menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten /Kota dalam memelihara Hubungan Timbal balik melalui pembinaan	Kab. Langkat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi ,Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan	100%	30.000.000	Koordinasi dengan Kementerian yang Menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten /Kota dalam memelihara Hubungan Timbal balik melalui	Kab. Langkat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi ,Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	100%	30.000.000	

	masing-masing kepada Instansi vertikal dan UPT dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten /Kota		dan Masyarakat			pembinaan masing-masing kepada Instansi vertikal dan UPT dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten /Kota					
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Kab. Langkat</b>		<b>100%</b>	<b>158.300.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Kab. Langkat</b>		<b>100%</b>	<b>158.300.000</b>	
	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Kab. Langkat</b>		<b>100%</b>	<b>148.300.000</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Kab. Langkat</b>		<b>100%</b>	<b>148.300.000</b>	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kab. Langkat	Jumlah Aplikasi terkait Pelayanan Adminduk		148.300.000	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kab. Langkat	Jumlah Aplikasi terkait Pelayanan Adminduk		148.300.000	
	<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Kab. Langkat</b>		<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Kab. Langkat</b>		<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>	
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan ,Penatausahaan ,Evaluasi ,Penegendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Langkat	Terfasilitasinya Pemanfaatan Data kependudukan oleh OPD	100%	10.000.000	Penyusunan Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan ,Penatausahaan ,Evaluasi ,Penegendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Langkat	Terfasilitasinya Pemanfaatan Data kependudukan oleh OPD	100%	10.000.000	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Kab. langkat</b>		<b>100%</b>	<b>67.500.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Kab. langkat</b>		<b>100%</b>	<b>67.500.000</b>	
	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Kab. Langkat</b>		<b>100%</b>	<b>37.500.000</b>	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Kab. Langkat</b>		<b>100%</b>	<b>37.500.000</b>	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Langkat	Tersedianya Buku agregat Data kependudukan	100%	37.500.000	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Langkat	Tersedianya Buku agregat Data kependudukan skala Kabupaten	100%	37.500.000	

			skala Kabupaten dan kecamatan persemester					dan kecamatan persemester			
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kab. Langkat	Tersedianya Buku Profil Perkembangan kependudukan	100%	30.000.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kab. Langkat	Tersedianya Buku Profil Perkembangan kependudukan	100%	30.000.000	
	<b>J u m l a h</b>				<b>10.459.635.446</b>	<b>J u m l a h</b>				<b>10.459.635.446</b>	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam penyusunan Renja Dukcapil Kabupaten Langkat Tahun 2024, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dukcapil Kabupaten Langkat Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat pada tahapan musrenbang Kecamatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dukcapil. Namun demikian terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang mendukung tugas dan fungsi Dukcapil yaitu berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

### **BAB III.**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

- PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- PN 3 : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
- PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- PN 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- PN 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- PN 7 : Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan tranformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dukcapil Kabupaten Langkat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

##### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2029-2024, Tema pembangunan Kabupaten

Langkat Tahun 2024 adalah **“Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja dalam Sektor Pariwisata dan Penyiapan Integrasi Sektor Ekonomi Unggulan (Pertanian, Perikanan, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM)**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kemandirian Desa;
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
3. Peningkatan Kualitas Kesehatan;
4. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Unggulan;
5. Pemulihan Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
6. Peningkatan Kualitas dan Kesempatan Kerja
7. Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam
8. Peningkatan Investasi dan PAD
9. Peningkatan Layanan Infrastruktur Wilayah dan Permukiman
10. Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Langkat Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dukcapil serta tujuan dan sasaran Renstra Dukcapil Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dukcapil Kabupaten Langkat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.  
Tujuan dan Sasaran Renja Dukcapil Kabupaten  
Langkat Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
	Terciptanya Reformasi birokrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi		Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Administrasi	3 %

	Kependudukan dengan Peningkatan Inovasi, Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi (SIT)		Kependudukan berbasis Sistem Informasi dan Teknologi (SIT)	
		Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	93,73%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	BB (70-80)

## **BAB IV.**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dukcapil Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dukcapil Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut (sesuai dengan yang diinput ke aplikasi SIPD).



## **BAB V. PENUTUP**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Langkat dan berpedoman pada Peraturan Bupati Langkat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 - 2024 serta mengacu pada Peraturan Bupati Langkat Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LANGKAT**

**FAIZAL RIZAL MATONDANG, S.Sos, M.AP  
NIP. 19691107 199303 1 009**